

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa data lapangan dan pembahasan yang sudah dibahas pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Keadaan keuangan Pemerintah Kota Blitar berada pada kategori kurang mandiri. Artinya, keuangan daerah Kota Blitar masih bergantung pada alokasi keuangan dari pusat. Hal ini terlihat pada rendahnya prosentase pendapatan asli daerah Kota Blitar terhadap total pendapatan di Kota Blitar;
2. Untuk menyikapi kondisi ini, diperlukan suatu langkah strategis yang terencana dan komprehensif di dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Salah satu strategi yang bisa dilakukan Kota Blitar menuju daerah yang lebih mandiri yaitu pembangunan Kota Blitar yang lebih terencana, Stimulus berbagai sektor ekonomi juga penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah, dan penggalan potensi PAD yang berkelanjutan. Strategi tersebut dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga bisa mendongkrak rasio kemandirian keuangan daerah;
4. Strategi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah yaitu dengan mencermati laporan historis terkait keuangan daerah khususnya pada pos pendapatan asli daerah itu sendiri;
5. Data historis tahun 2013, sudah bisa dipetakan bahwa PAD yang paling kecil berasal dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang

hanya sebanyak 1,41% atau sebesar 865 juta. Padahal untuk beberapa daerah, PAD justru didominasi oleh pajak dan pendapatan dari badan usaha daerahnya. Seperti diketahui bahwa pada pos ini penerimaan diperoleh dari aktivitas seperti pendapatan bersih dari pengelolaan badan usaha milik daerah. Pengembangan badan usaha milik daerah berfungsi untuk meningkatkan PAD dari pos ini, sehingga bisa meningkatkan PAD secara bertahap. Semakin berkembang Badan Usaha Milik Daerah maka semakin besar nantinya laba bersih yang didapat, dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor ini;

6. Strategi lain yang mungkin bisa dikatakan kurang populis dalam kondisi perekonomian saat ini adalah menaikkan pajak dan retribusi. Hal ini dikarenakan kedua komponen ini menjadi sangat sensitif ditengah masyarakat yang menghadapi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh, peningkatan belanja modal diperlukan dalam peningkatan peran BUMD dalam perekonomian daerah dan menambah pundi pundi PAD yang lebih intensif.

B. Saran

Dengan mengedepankan beberapa kesimpulan dan analisis yang ada, maka disarankan kepada pemerintah daerah Kota Blitar untuk melakukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan rasio kemandirian daerah, di antaranya:

1. Melakukan prioritas perencanaan peningkatan pos penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Memprioritaskan belanja modal yang lebih untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas BUMD di Kota Blitar;
3. Meningkatkan penerimaan pendapatan asli dari daerah dari sektor lain seperti pajak dan retribusi, tetapi dengan perencanaan yang matang karena kebijakan ini biasanya tidak populer di masyarakat;
4. Untuk peneliti lain, disarankan untuk meneliti lebih dalam terkait bagaimana strategi dalam meningkatkan rasio kemandirian daerah dengan langkah dan penelitian yang lebih konkrit misalkan sampai pada proyeksi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah dengan menganalisa sampai dengan proposal bisnis, perencanaan keuangan proforma, dan pos pos lain yang penting.